

**STUDI TERHADAP PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA
INVESTOR DENGAN CV.BINTANG ANUGERAH MANDIRI**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I
Pada Jurusan Hukum Fakultas Hukum**

Oleh:

GUNTUR PANJI BUONO

C100160310

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2020

HALAMAN PERSETUJUAN

STUDI TERHADAP PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA INVESTOR
DENGAN CV.BINTANG ANUGERAH MANDIRI

PUBLIKASI ILMIAH

oleh:

GUNTUR PANJIBUONO

C100160310

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen Pembimbing



(Dr. Kelli Wardhana, S.H., M.H.)

HALAMAN PENGESAHAN
STUDI TERHADAP PERIJINAN KERJASAMA ANTARA INVESTOR
DENGAN CV.BINTANG ANUGERAH MANDIRI


Oleh


GUNTUR PANJI BUONO


C100160310

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Fakultas Hukum
Pada hari Sabtu, 13 Juni 2020
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji:

1. Dr. Kelik Wardiono, S.H.,M.H. ()
(Ketua Dewan Penguji)

2. Inayah, SH,M.H. ()
(Anggota I Dewan Penguji)

3. Septarina Budiawati, S.H., M.H ()
(Anggota II Dewan Penguji)

Dekan,



Prof. Dr. H. Abdulzafar Dimiyati, S.H., M.Hum.
NIDN.0727085803

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam publikasi ilmiah ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya ini di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 8 Juni 2020

Penulis



GUNTUR PANJI BUONO

C100160310

STUDI TERHADAP PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA INVESTOR DENGAN CV.BINTANG ANUGERAH MANDIRI

Abstrak

Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seseorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa ini timbulah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Suatu perjanjian sendiri baik secara tertulis maupun tidak tertulis haruslah mengikat kedua belah pihak meskipun akan lebih memudahkan dalam pembuktian jika janji dibuat dalam bentuk tertulis. Perjanjian sendiri mengandung klausula apapun yang pada intinya adalah para pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut akan mendapatkan keuntungan atas perjanjian yang dibuatnya salah satunya adalah perjanjian investasi. Kata investasi dan keuangan sudah menjadi pembicaraan orang sehari-hari hampir setiap surat kabar dan media lainnya memberitakan berbagai hal mengenai perjanjian investasi keuangan. adanya investasi dalam kegiatan ekonomi hal tersebut dapat membantu pemerintah untuk mempercepat pembangunan ekonomi nasional dan mewujudkan kedaulatan politik.

Kata Kunci: Perjanjian, Perikatan, Investasi

Abstract

An agreement is an event where someone promises to someone else or where two people promise each other to do something. From this incident arises a relationship between the two people called an engagement. An agreement both written and unwritten must be binding on both parties, although it will be easier to prove if the promise is made in written form. The agreement itself contains any clause which in essence is the parties involved in the agreement will benefit from the agreement made, one of which is the investment agreement. The word investment and finance has become a daily conversation among almost every newspaper and other media reporting on various matters regarding financial investment agreements. investment in economic activities can help the government to accelerate national economic development and realize political sovereignty

Keywords: Agreement, Engagement, Investment

1. PENDAHULUAN

Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seseorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa ini timbulah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan

suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.¹ Selain itu perjanjian dapat dibuat juga secara bebas, bebas untuk mengadakan perjanjian dengan siapapun, bebas untuk menentukan bentuk perjanjian maupun syarat-syarat dan bebas untuk menentukan bentuk perjanjian itu sendiri, yaitu tertulis dan tidak tertulis. Pasal 1338 KUH Perdata menyatakan bahwa *semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang undang bagi mereka yang membuatnya*. Perjanjian sendiri mengandung klausula apapun yang pada intinya adalah para pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut akan mendapatkan keuntungan atas perjanjian yang dibuatnya salah satunya adalah perjanjian investasi. Investasi dapat dilakukan oleh semua pihak, baik oleh masyarakat luas, sebagai kegiatan bisnis, ataupun sosial, maupun oleh pemerintah sebagai penyelenggara negara sebagai kegiatan untuk pelayanan kebutuhan masyarakat, yang menjadi tugas utamanya. Disisi lain investasi adalah kegiatan yang menghasilkan **nilai tambah** (*Value added*) yang merupakan sumber utama kesejahteraan masyarakat.² Investasi sendiri secara harfiah dapat diartikan sebagai aktifitas atau kegiatan penanaman modal, sedangkan investor adalah orang atau badan hukum yang mempunyai uang untuk melakukan investasi atau penanaman modal.³ Ada berbagai macam pengertian investasi menurut para ahli salah satunya adalah Tandelilin. Tandelilin mendefinisikan bahwasanya investasi adalah komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini, dengan tujuan memperoleh keuntungan dimasa datang. Sebagai misal, seseorang yang pada saat ini membeli saham perusahaan *go public* dia mengharapkan pada periode yang akan datang memperoleh keuntungan baik

¹Subekti. 2000. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: PT Intermasa, hal 2.

² Faizal Henry, 2006, *Investasi Pengelolaan Keuangan Bisnis Dan Pengembangan Ekonomi Masyarakat*, Jakarta Barat : PT Indeks, hlm xiii.

³ Marzuki usman singgih riphath syahrir ika, 1997, *pengetahuan dasar pasar modal*. Jakarta , jurnal keuangan dan moneter, hal 45

yang berupa selisih harga jual dengan harga beli (*capital gains*) maupun dividen sebagai imbalan atas resiko tertentu dan pengorbanan waktu dalam investasi.⁴ Pada prinsipnya tujuan investasi adalah untuk menghasilkan “sejumlah uang ” namun pernyataan ini nampaknya terlalu menyederhanakan persoalan (tujuan) investasi itu sendiri.

1.2 Rumusan Masalah

- 1.2.1 Bagaimana konstruksi hukum isi perjanjian investasi antara investor dengan CV.Bintang Anugerah Mandiri?
- 1.2.2 Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat dalam perjanjian kerjasama baik investor maupun CV.Bintang Anugerah Mandiri ?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan konstruksi hukum dalam perjanjian investasi dan mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi investor dan pengelola dana dalam perjanjian investasi. Secara subjektif bertujuan menambah pengetahuan dan wawasan dibidang hukum, khususnya hukum perdata mengenai konstruksi dan bentuk perlindungan hukum bagi investor dan pengelola dana dalam perjanjian investasi

1.3.2 Manfaat Penelitian

Manfaat Teoritis penelitian ini memberi sumbangan pemikiran untuk perkembangan ilmu hukum khususnya dibidang hukum perdata dan menambah wawasan dan pengetahuan ilmiah. Manfaat Praktis memberi manfaat melalui analisis yang telah dipaparkan terkait perjanjian investasi.

⁴ Tandililin E (2001), Analisis Investasi dan manajemen Portofolio edisi pertama, BPFE, Yogyakarta, hlm 36

2. METODE

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode pendekatan doktrinal. Pada penelitian hukum jenis ini, acap kali hukum dikonsepskan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in books) atau hukum dikonsepskan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia dianggap pantas.⁵

Jenis Penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif, penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian yang dimaksudkan untuk menjelaskan mendeskripsikan dan menjabarkan data data yang berkaitan tentang konstruksi hukum perjanjian investasi antara investor dengan pengelola dana dan perlindungan hukum isi perjanjian investasi antara investor dengan pengelola dana secara rinci dan sistematis

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Konstruksi Hukum Meliputi: Subyek Hukum, Obyek Hukum Hak dan Kewajiban Pokok

3.1.1 Subyek hukum dari Perjanjian antara CV Bintang Anugerah Mandiri Lampung dengan Investor

Perjanjian merupakan suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seseorang lain atau dimana orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. salah satu jenis perjanjian sendiri adalah perjanjian investasi yang dibuat oleh Abdul kodir dengan CV. Bintang Anugerah Mandiri. Abdul kodir selaku investor disebut sebagai pihak pertama memiliki modal sebesar Rp 200.000.000 (*dua ratus juta rupiah*) yang beralamat di Desa Kawis, Lampung selatan. Pihak kedua sendiri disini adalah CV. Bintang Anugerah Mandiri dimana CV ini bergerak dalam bidang peternakan ayam potong yang beralamat di Jl. Sri Bungsur Desa Jatibaru Tanjung Bintang, Lampung Selatan. Pihak kedua dalam perjanjian ini

⁵ Amirudin & Zaenal Asiki, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Rajawali Pers, hal 118

diwakili langsung oleh Direktur CV.Bintang Anugerah Mandiri yaitu Zurrahman Umnis.

3.1.2 Obyek hukum dari Perjanjian antara CV Bintang Anugerah Mandiri Lampung dengan Investor

Bahwa pelaksanaan dalam Peningkatan Modal investasi Dibidang Peternakan Ayam Potong yang melibatkan Abdul Kodir selaku investor dengan CV.Bintang Anugerah Mandiri dibuat dan dilaksanakan melalui perjanjian kerjasama investasi yang ditandatangani oleh Abdul Kodir dengan perwakilan CV.Bintang Anugerah Mandiri yaitu Zurrahman Umnis selaku Direktur dan dibuat secara tertulis.

3.1.3 Hak dan Kewajiban Para Pihak

Bentuk kerjasama tersebut menimbulkan hak dan kewajiban pokok sebagai berikut :

Pasal 4

Hak Dan Kewajiban Pihak Pertama

Dalam perjanjian kerjasama ini,pihak pertama memiliki hak dan kewajiban sebagai berikut :

1. Memberikan Dana Investasi kepada pihak kedua sebesar Rp 200.000.000,- (*dua ratus juta rupiah*)
2. Berhak meminta kembali Dana Investasi yang telah diserahkan kepada pihak kedua dengan ketentuan pasal 3 ayat 2
3. Menerima hasil keuntungan atas pengelolaan Dana Investasi sesuai dengan pasal 6 perjanjian ini

Pasal 5

Hak Dan Kewajiban Pihak Kedua

Dalam perjanjian kerjasama investasi modal ini,pihak kedua memiliki hak dan kewajiban sebagai berikut :

1. Menerima Dana Investasi dari pihak pertama sebesar Rp.200.000.000,- (*dua ratus juta rupiah*)

2. Memberikan bagian hasil keuntungan kepada pihak pertama,sesuai dengan pasal 6 perjanjian ini

Berdasarkan pasal 1619 KUHPerdata pemasukan atau *inberg* yang dijanjikan oleh masing-masing sekutu dapat berupa uang,barang,dan usaha kedalam perseroan.Dalam isi perjanjian kerjasama tersebut dijelaskan bahwa pemasukan atau inberg yang dijanjikan adalah sejumlah uang yang diatur dalam pasal IV ayat 1 yaitu pihak pertama selaku investor memberikan dana investasi kepada pihak kedua sebesar Rp.200.000.000,- (*dua ratus juta rupiah*).

Selain itu menurut pasal 1618 sendiri menyebutkan bahwa “perseroan perdata adalah suatu persetujuan antara dua orang atau lebih yang berjanji untuk memasukan sesuatu ke dalam perseroan itu dengan maksud supaya keuntungan yang diperoleh dari perseroan itu dibagi diantara mereka”.Mengenai pembagian keuntungan ,dalam isi perjanjian kerjasama dijelaskan dalam pasal 6 ayat 1 yaitu kedua belah pihak sepakat dan setuju bahwa perjanjian kerjasama ini dilakukan dengan cara pemberian keuntungan yang diperoleh dalam usaha peningkatan modal investasi dibidang peternakan ayam potong yang berlokasi diKecamatan Tanjung Bintang,Lampung Selatan sebagaimana diatur dalam pasl 2 ayat 3.

Dari perbandingan tersebut dapat diketahui bahwa dalam KUHP perdata menyebutkan bahwa para pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian harus ada persetujuan antara dua orang atau lebih untuk memasukan sesuatu (*inberg*) ke dalam perseroan dan *inberg* yang dijanjikan sendiri dapat berupa uang, ,barang,dan usaha kedalam perseroan.dimana keduanya sudah dijelaskan dalam pasal 4 dan 5 mengenai Hak dan Kewajiban Para Pihak.

Hubungan hukum dalam pelaksanaan peningkatan modal investasi dibidang Peternakan Ayam yang menimbulkan hak dan

kewajiban para pihak yang terlibat didalam perjanjian tersebut telah sesuai dengan ketentuan Norma dan Doktrin.

Hubungan hukum dalam pelaksanaan peningkatan modal investasi dbidang Peternakan ayam yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang terdapat dalam perjanjian tersebut telah sesuai dengan norma dan doktrin,karena dalam KUHperdata menyebutkan bahwa suatu perseroan perdata dibuat berdasarkan persetujuan antara dua orang atau lebih yang berjanji memasukan sesuatu ke dalam perseroan tersebut dengan maksud supaya keuntungan yang diperoleh dari perseroan itu dibagi diantara mereka dan diwajibkan untuk masing masing sekutunya memasukan uang,barang,atau usaha kedalam perseroa itu.Yang mana dalam hal ini para pihak dalam perjanjian kerjasama memiliki hak dan kewajiban tentang apa yang harus dimasukan ke dalam perseroan agar keuntungan yang diperoleh dapat dibagi diantara mereka berupa peningkatan modal investasi di bidang Peternakan ayam.

3.2 Perlindungan Hukum Meliputi: Hak dan kewajiban lain selain hak dan kewajiban pokok, wanprestasi dan akibat hukumnya, overmacht dan akibat hukumnya.

3.2.1 Hak dan Kewajiban lain selain Hak dan Kewajiban Pokok

Bahwa hubungan kerja yang dilakukan oleh pihak pertama dengan pihak kedua merupakan hubungan kerja yang saling mengikatkan diri dalam suatu perjanjian kerjasama investasi dalam peningkatan modal investasi dibidang peternakan ayam potong.Dimana dalam suatu perjanjian pastinya memiliki hak dan kewajiban pokok serta hak dan kewajiban lain.Maka dari itu hubungan kerja antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua tersebut menimbulkan Hak dan Kewajiban (selain hak dan kewajiban pokok) sebagai berikut:

Pasal 3

Jangka Waktu Kerjasama

1. Perjanjian kerjasama ini dilakukan dan diterima untuk jangka waktu 24 (*dua puluh empat*) bulan, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian kerjasama ini hingga tanggal 07 Desember 2016 dan modal akan dikembalikan pada bulan ke-25 (*dua puluh lima*) secara utuh tanpa potongan (100%) serta dapat diperpanjang dengan persetujuan kedua belah pihak untuk jangka waktu yang sama
2. Jangka waktu perjanjian berakhir manakala pihak pertama menginningkan Dana Investasi tersebut diminta kembali untuk keseluruhnya, dengan catatan Dana Investasi telah 12 (*dua belas*) bulan sejak perjanjian ini ditandatangani dan pihak pertama memberikan pemberitahuan untuk meminta kembali Dana Investasi paling lambat 1 (*satu*) bulan sebelum diserahkan kembali oleh pihak kedua, maka pihak kedua akan mengembalikan Dana Investasi kepada pihak pertama sejumlah modal tanpa pembagian hasil dalam pengertian; Dana Investasi dikurangi pembagian hasil yang sudah diterima pihak pertama.

Pasal 6

Pembagian Hasil

Dalam perjanjian ini kerjasama investasi modal ini, kedua belah pihak sepakat didalam hal pembagian hasil investasi penyertaan dana sebagai berikut :

1. Kedua belah pihak sepakat dan setuju bahwa perjanjian kerjasama ini dilakukan dengan cara pemberian keuntungan yang diperoleh dalam usaha peningkatan modal investasi di Bidang Peternakan Ayam Potong yang berlokasi di Kecamatan Tanjung Bintang-Lampung Selatan sebagaimana pasal 2 ayat 3 perjanjian ini

2. Bagi hasil yang dimaksud dalam ayat 1 diatas dilakukan dengan memperhitungkan biaya investasi sebagaimana tersebut dalam pasal 2 ayat 1
3. Bagi hasil yang dimaksud dalam ayat 2 diatas berlaku sampai dengan pihak pertama menarik kembali Dana Investasi yang telah diserahkan sesuai dengan perhitungan pasal 2 ayat 3 perjanjian ini.

Dari perbandingan tersebut dapat diketahui bahwa dalam KUHP perdata menyebutkan bahwa para pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian harus ada persetujuan antara dua orang atau lebih untuk memasukan sesuatu (*inberg*) ke dalam perseroan dan *inberg* yang dijanjikan sendiri dapat berupa uang, ,barang,dan usaha kedalam perseroan serta harus harus memenuhi segala ketentuan karena sudah menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang terlibat didalamnya.dimana keduanya sudah dijelaskan dalam pasal 3 dan 6 mengenai Jangka waktu dan Pembagian Hasil.

3.2.2 Overmacht dan Akibat Hukumnya (Keadaan Memaksa)

Hasil Pasal 7

Keadaan Memaksa (Overmacht)

1. Yang termasuk dalam Overmacht adalah akibat dari kejadian-kejadian diluar kuasa dan kehendak dari kedua belah pihak diantaranya termasuk tidak terbatas bencana alam,banjir,badai,topan,gempabumi,kebakaran,perang,huru-hara,pemberontakan,demonstrasi,pemogokan,kegagalan investasi.
2. Jika dalam pelaksanaan perjanjian ini terhambat ataupun tertunda baik secara keseluruhan ataupun sebagian yang dikarenakan hal-hal tersebut dalam ayat 1 diatas maka pihak kedua bersedia mengganti sejumlah dana investasi dari pihak pertama secara penuh apabila belum ada pembagian hasil

keuntungan,atau pengembalian dana investasi dikurangi dengan pembagian hasil yang sudah diterima oleh pihak pertama.

3. Pengembalian dana investasi sebagaimana tersebut dalam ayat 2,mengenai tata cara pengembalianya akan diadakan musyawarah terlebih dahulu antara pihak pertama dan pihak kedua mengenai proses atau jangka waktu pengembalianya.

Keadaan memaksa (*overmacht*) yang terdapat dalam perjanjian kerjasama tersebut dengan ketentuan yang ada dalam Norma, Yurisprudensi,dan Doktrin telah sesuai,karena isi perjanjian kerjasama menyebutkan dan menjelaskan mengenai Keadaan memaksa (*overmacht*) yaitu apabila dalam pelaksanaan perjanjian terdapat hambatan ataupun tertunda baik secara keseluruhan ataupun sebagian yang dikarenakan hal-hal atau kejadian diluar kuasa dan kehendak dari kedua belah pihak,maka pihak kedua bersedia mengganti sejumlah dana investasi dari pihak pertama secara penuh apabila belum ada pembagian hasil keuntungan,atau pengembalian dana investasi dikurangi dengan pembagian hasil yang sudah diterima oleh pihak pertama dan dalam pengembalian dana invetasi tersebut akan dilakukan serta diadakan musyawarah oleh pihak pertama dan pihak kedua mengenai proses dan jangka waktu pengembalianya.

3.2.3 Wanprestasi dan Akibat Hukumnya

Pasal 8

Wanprestasi

- 1) Dalam hal salah satu pihak telah melanggar kewajibanya yang tercantum dalam salah satu pasal perjanjian ini,telah cukup bukti dan tanpa perlu dibuktikan lebih lanjut,bahwa pihak yang melanggar tersebut telah melakukan tindakan wanprestasi
- 2) Pihak yang merasas dirugikan atas tindakan wanprestasi tersebut dalam ayat 1 diatas,berhak meminta ganti kerugian

dari pihak yang melakukan wanprestasi tersebut atas sejumlah kerugian yang dideritanya, kecuali dalam hal kerugian tersebut disebabkan karena adanya suatu keadaan memaksa, seperti tercantum dalam pasal 7.

Suatu perjanjian sendiri baik secara tertulis maupun tidak tertulis haruslah mengikat kedua belah pihak meskipun akan lebih memudahkan dalam pembuktian jika janji dibuat dalam bentuk tertulis. Ketidakmampuan maupun kelalaian para pihak untuk memenuhi hak dan kewajiban yang diperjanjikan dalam perjanjian dikualifikasikan sebagai suatu perbuatan cidera janji (wanprestasi) adapun wanprestasi menurut pasal 1243 KUH perdata yaitu ; “Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan bila debitur, walaupun dinyatakan telah lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”

Menurut subekti bentuk bentuk wanprestasi antara lain:

- a) tidak melaksanakan apa yang disanggupi akan dilakukan
- b) melaksanakan apa yang diperjanjikan tapi tidak sempurna
- c) melaksanakan apa yang dijanjikan tapi tidak tepat waktu dan
- d) melaksanakan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan

Dalam isi perjanjian kerjasama tersebut dituliskan bahwa apabila salah satu pihak telah melanggar kewajibannya yang tercantum dalam salah satu pasal perjanjian ini pihak yang merasa dirugikan atas tindakan wanprestasi tersebut berhak meminta ganti kerugian dari pihak yang melakukan wanprestasi atas sejumlah kerugian yang dideritanya kecuali dalam hal kerugian tersebut disebabkan karena adanya suatu keadaan memaksa.

Wanprestasi sendiri merupakan suatu bentuk tindakan atau perilaku yang dilakukan salah satu pihak yang tidak melaksanakan kewajibannya padahal sudah tercantum dalam isi atau pasal pasal dalam suatu perjanjian. Para pihak yang merasa dirugikan akibat wanprestasi tersebut dapat mengakhiri perjanjian, melakukan pembatalan, atau meminta ganti kerugian terhadap pihak yang telah melanggar isi perjanjian tersebut.

Wanprestasi yang terdapat dalam perjanjian kerjasama tersebut dengan ketentuan yang ada dalam norma telah sesuai,

Wanprestasi yang terdapat dalam perjanjian kerjasama tersebut dengan ketentuan yang ada dalam Norma, Yurisprudensi, dan Doktrin telah sesuai, karena isi perjanjian kerjasama menyebutkan dan menjelaskan mengenai wanprestasi yaitu apabila salah satu pihak telah melanggar kewajibannya yang tercantum dalam salah satu pasal perjanjian ini pihak yang merasa dirugikan atas tindakan wanprestasi tersebut berhak meminta ganti kerugian dari pihak yang melakukan wanprestasi atas sejumlah kerugian yang dideritanya kecuali dalam hal kerugian tersebut disebabkan karena adanya suatu keadaan memaksa.

4. PENUTUP

Berdasarkan permasalahan di atas, maka adapun kesimpulannya sebagai berikut:

Perjanjian antara investor dengan CV. Bintang Anugerah Mandiri merupakan perjanjian persekutuan perdata. Hal ini sesuai dengan pasal 1618 KUH perdata dan pendapat Gunawan Widjaya.

Pengaturan mengenai hak dan kewajiban pihak pertama berupa pemberian dana investasi, meminta kembali dana investasi, dan menerima hasil keuntungan atas pengelolaan dana investasi telah sesuai dengan pasal 1619, 1625, 1626, dan 1627 KUH perdata KUH perdata dan pendapat Gunawan Widjaya

Pengaturan mengenai hak dan kewajiban pihak kedua berupa menerima dana investasi dan memberikan bagian hasil keuntungan atas pengelolaan dana investasi telah sesuai dengan pasal 1619,1625,1626,dan 1627 KUHperdata KUH perdata dan pendapat Gunawan Widjaja.

Pengaturan tentang mengenai hak dan kewajiban para pihak selain yang pokok berupa jangka waktu perjanjian dan pembagian hasil telah sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1633,1634,dan 1635 KUH perdata.

Pengaturan tentang Overmacht (Keadaan memaksa) pihak pertama dan kedua dalam bentuk yang berhubungan dengan penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan telah sesuai dengan pasal 1245 KUH perdata.

Pengaturan tentang Wanprestasi pihak pertama dan pihak kedua dalam bentuk terjadinya perselisihan antara para pihak yang terlibat dalam perjanjian investasi akibat tidak dipenuhinya kewajiban para pihak yang berupa pemenuhan prestasi telah sesuai dengan pasal 1243 KUH perdata dan pendapat Subekti dalam bukunya yang berjudul Hukum Perjanjian. Dan dengan akibat hukum wanprestasi sendiri berupa diselesaikan dengan cara pihak yang dirugikan berhak meminta ganti kerugian dari pihak yang melakukan wanprestasi tersebut atas sejumlah kerugian yang dideritanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Amirudin & Zaenal Asiki. 2012. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- E, Tandelilin, 2001. *Analisis Investasi Dan Manajemen Portofolio Edisi Pertama*. Yogyakarta: BPFE.
- Henry, Faizal. 2006. *Investasi Pengelolaan Keuangan Bisnis dan Pengembangan Ekonomi Masyarakat*. Jakarta: Pt Indeks.
- Subekti. 2000. *Hukumperjanjian*. Jakarta: PT. Intermasa
- Usman, Marzuki, Singgih Riphath Syahrir Ika. 1997. *Pengetahuan Dasar Pasar Modal*. Jakarta: Jurnal Keuangan Dan Moneter.